

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

Nurni Arrina Lestari

Manajemen Retail, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

korespondensi: nurniarrinalestari@ummi.ac.id

ABSTRACT

This study investigates how transparency and accountability affect the quality of regional financial statements in the local government of Sukabumi City. This study used a quantitative approach. This research involved 30 SKPDs of the Sukabumi City Government, consisting of 102 individuals. All populations are sampled in a non-probability sampling method. The distribution of questionnaires to respondents is a method of data collection. Data analysis tools using multiple linear regression. The results of the analysis show that transparency and accountability have a positive effect on the quality of regional financial statements, with the influence being 69.2%, and 30.8% influenced by other factors.

Keywords: Transparency, Accountability, Quality of financial statements

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki bagaimana transparansi dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah di pemerintahan daerah Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini melibatkan 30 SKPD Pemerintahan Kota Sukabumi, yang terdiri dari 102 individu. Semua populasi diambil sebagai sampel dalam metode non probability sampling. Penyebaran kuesioner kepada responden adalah metode pengumpulan data. Alat analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dengan pengaruhnya adalah 69,2%, dan 30,8% dipengaruhi faktor lain.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Kualitas laporan keuangan

PENDAHULUAN

Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat 1 dan 2 tentang Keuangan Negara. Mensyaratkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dibuat oleh komite standar independen dan diregulasikan dengan Peraturan Pemerintah (PP), setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (1).

Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1 tentang Perbendaharaan Negara. Mewajibkan Menteri Keuangan/Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara atau Daerah, dan Pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran untuk pembiayaan dan transaksi pendapatan dan belanja yang bertanggung jawab masing-masing (2). Dengan keluarnya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kedua Undang - Undang tersebut mulai diberlakukan. Informasi keuangan diperlukan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Informasi ini harus disediakan oleh pemerintah. Informasi keuangan digunakan untuk mengetahui keadaan keuangan dari aktivitas usaha, membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan,

memastikan derajat ketaatan atas regulasi undang - undangan yang berkaitan pada masalah keuangan dan ketetapan lainnya, dan menilai efisiensi dan efektivitasnya (3).

Menurut Konteks trasedental Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010, kriteria dan komponen pembentuk karakteristik fakta yang membuat informasi keuangan pemerintah bernilai atau bermanfaat. Adapun hasil investigasi BPK di tahun 2013-2015, diketahui bahwa pada tahun 2013 terdapat 524 LKPD yang diperiksa. Opini WTP diberikan oleh BPK kepada 156 instansi, opini WDP diberikan kepada 311 instansi, opini Tidak Wajar diberikan kepada 11 instansi, dan pandangan Tidak Memberi Pendapat diberikan kepada 9 instansi. Pada tahun 2014, ada 504 LKPD yang diperiksa, dan pada tahun 2015, 533 LKPD yang diperiksa, BPK memberikan opini WTP pada 312 entitas dan opini WDP pada 187 entitas, serta opini Tidak Wajar pada 4 instansi dan opini Tidak Memberi Pendapat pada 1 instansi.

Dapat dilihat bahwa memang kondisi LKPD dari tahun ke tahun semakin membaik, tetapi dari data diatas juga bisa dilihat bahwa ada banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang belum menerima penilaian wajar. Dikarenakan masih banyak ditemukan permasalahan - permasalahan yaitu dalam proses penyusunan laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pencatatan yang belum dilakukan atau tidak akurat, terlambatnya dalam menyampaikan laporan, penempatan akun-akun yang belum sesuai atas ketetapan, SIA dan laporan yang

tidak akseptabel serta SDM yang tidak memadai, sehingga hasil laporan keuangan pemerintah daerah belum bisa dikatakan berkualitas karena masih banyak permasalahan yang harus dibenahi atau diperbaiki (4). Berdasarkan uraian di atas studi ini bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan daerah di pemerintah daerah kota sukabumi

METODE

Penelitian ini menggambarkan penelitian asosiatif kausal dengan metodologi kuantitatif. Sebuah studi yang berusaha memahami hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dikenal sebagai penelitian asosiatif kausal. Penelitian ini akan memperjelas hubungan antara variabel yang akan diteliti, yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan. Ketika data yang akan digunakan untuk menguji pengaruh antara faktor-faktor dinyatakan sebagai angka, teknik kuantitatif diterapkan. Data primer dipakai dalam penyelidikan ini. Data primer merupakan data yang terkumpul dari wawancara dan observasi langsung kepada responden. Data primer riset ini dikumpulkan dari penyebaran kuesioner, yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah 102 orang yang bertugas menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebanyak 102 orang. Sampel diambil dengan teknik *nonprobability sampling* dan dengan, populasi tersebut telah diambil seluruhnya untuk dijadikan sampel penelitian. Kuesioner

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Asumsi utama yang dibuat saat menggunakan metodologi ini adalah bahwa subjek penelitian memiliki pengetahuan tentang diri mereka sendiri dan bahwa informasi yang mereka berikan akurat serta dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, kuesioner ini disebarluaskan kepada responden oleh peneliti. Ada daftar pertanyaan pada kuesioner yang digunakan yang ditutup karena jawaban alternatif tersedia. Untuk melengkapi analisis penelitian ini, telah dikumpulkan data sekunder berupa manuskrip data yang dibutuhkan. Untuk melakukan analisis regresi berganda menggunakan variabel moderat dan tes interaksi pada data untuk memeriksanya dan menilai hipotesis dari studi ini. Dalam penelitian ini, transformasi dilakukan dengan proses pemusatan yang memanfaatkan nilai simpangan rata-rata variabel, yaitu mengurangi masalah multiline yang biasanya disebabkan oleh regresi dengan interaksi (5). Dalam riset ini dependent

variabelnya yaitu kualitas laporan keuangan daerah (Y), transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2) merupakan komponen independen. Model regresi berganda yang dikembangkan untuk penyelidikan ini diwakili oleh persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \dots\dots\dots [1]$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Jumlah responden studi ini adalah 102 orang yang bertugas sebagai penyusun serta menyajikan laporan keuangan di 30 SKPD Kota Sukabumi, diantaranya Bendahara 31 orang, Kasubag 26 orang, Sekretaris 31 orang, dan Staf keuangan berjumlah 14 orang. Adapun karakteristik dari responden ini berdasarkan gender, di mana responden laki-laki lebih banyak dari responden perempuan. Sedangkan umur responden yaitu berkisar antara 25 tahun sampai dengan > 50 tahun. Tingkat pendidikan responden yaitu dari SMA sampai dengan S2.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1. Jenis Kelamin		
Laki-laki	60	58,8%
Perempuan	42	41,2%
2. Umur		
25 – 35	30	29,4%
36 – 50	63	61,8%
> 50	9	8,8%
3. Tingkat Pendidikan		
SMA	12	11,8%
Diploma	6	5,8%
S1	72	70,6%
S2	12	11,8%
Jumlah	102	100%

Uji Asumsi Klasik**1) Uji Normalitas**

Normalitas tes menentukan baik tidaknya nilai residual didistribusikan. Memiliki nilai residual yang terdistribusi secara teratur

adalah teknik regresi yang efektif (5). Dalam uji normalitas *one sampel kolgomorov-smirnov* $p\text{-value} = 0,200 > 0,05$, menerangkan data terdistribusi normal.

Tabel 2. One Sampel Kolgomorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	306
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}

2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan sebagai pendeteksi apakah variabel independen dalam model regresi bersifat kolinear ataupun saling berkorelasi. Pada regresi model, interkorelasi didefinisikan sebagai hubungan linier atau signifikan yang ada antara variabel independen atau variabel prediktor tertentu dan variabel prediktor lainnya. Variabel bebas tidak boleh berkorelasi dengan model regresi yang baik (5). Dengan memeriksa nilai

Tolerance and VIF, memungkinkan sebagai penentu ada tidaknya multikolinearitas. Kedua pengukuran ini, yang didasarkan pada pengambilan keputusan, mengungkapkan variabel independen mana yang masing-masing dijelaskan oleh faktor independen lainnya. Untuk memenuhi syarat sebagai variabel independent multikolinearitas, kuantitas tolerance 0,10 ($>0,1$) serta kuantitas VIF < 10 terlihat pada tabel ini:

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

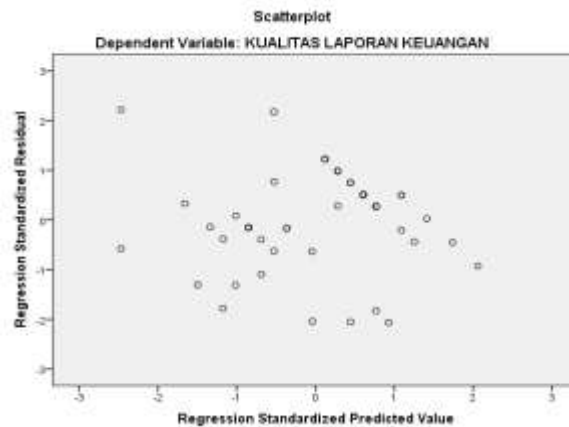
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Transparansi (X_1)	0,825	1,213	Bebas Multikolinearitas
Akuntabilitas (X_2)	0,825	1,213	

Sumber: data primer yang sudah diolah, 2023

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dipakai sebagai penentu residual dari dua pemantauan model regresi berbeda. Jika variansi antara residual dari seluruh pengamatan tidak berubah. Model regresi yang tidak menunjukkan heteroskedastisitas merupakan model yang baik (5). Grafik plot antara nilai proyeksi

variabel dependent dengan residualnya dapat dipakai untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas antar variabel independen. Tidak ada masalah heteroskedastisitas, seperti yang ditunjukkan oleh gambar scatterplot berikut, di mana titik menyebar dengan pola tidak beraturan.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi berganda sebagai pengembangan dalam riset ini dinotasikan dalam persamaan berikut ini:

$$Y = -,816 + 0,340 X_1 + 0,678 X_2 \dots\dots\dots[1]$$

Variabel transparansi dan akuntabilitas terdapat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Karena nilai *p-value* transparansi 0,007 < 0,05, *p-value*

akuntabilitas 0,000 < 0,05, *p-value* jaminan 0,000 < 0,05. Uji F nilai sig. 0,000 < 0,05; yaitu terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat serta uji determinasi (R^2) didapat nilai 0,692 maknanya ragam independent variabel dapat menerangkan kualitas laporan keuangan adalah 69,2%, tetapi 30,8% dipengaruhi variabel lain.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel Penelitian	B	Beta	t	Sig.
Transparansi (X_1)	0,340	0,251	2,845	0,007
Akuntabilitas (X_2)	0,678	0,695	7,883	0,000
R Square = 0,692	F _{hitung} = 53,957			
Adjusted R ² = 0,679	Probabilitas F = 0,000			

Pembahasan

Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Ada pengaruh positif variabel transparansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil statistik penelitian terlihat dari nilai sig = 0,007 < 0,05 dengan nilai koefisien 0,340. Temuan riset ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan adanya pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan (6,7).

Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Variabel akuntabilitas ada pengaruh positif atas kualitas laporan keuangan, berdasarkan hasil uji statistik, dimana *p-value* adalah 0,000 < 0,05. Hasil studi ini sama dengan penelitian yang menerangkan akuntabilitas mempengaruhi kualitas laporan keuangan (8–10).

SIMPULAN

Hasil analisis uji statistik menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh sebesar 69,2% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan 30,8% nya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia akademisi, dan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, serta dapat bermanfaat dalam menambah dan memperluas pengetahuan bagi para peneliti. Diharapkan penelitian ini akan berdampak pada dunia pendidikan, instansi Pemerintahan Kota Sukabumi, dalam memaksimalkan transparansi dan akuntabilitas agar laporan keuangan daerah berkualitas. Diharapkan riset ini menjadi acuan peneliti lainnya yang melakukan riset mengenai transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Serta saran untuk riset ke depannya untuk melibatkan banyak SKDP, penambahan responden, dan menambahkan metode lainnya sebagai penguat data kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jati BP. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*. 2019;21(1):1–14.
2. Auditya L, Husaini H, Lismawati L. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*. 2013;3(1):21–42.
3. Suwarno S, Lustrilanang P, Sunardi S. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Desa, Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. 2023 Apr 5;11(1):177–86.
4. Nuraini N, Kirmizi K, Kamaliah K. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating. *Pekbis Jurnal*. 2019;11(3):210–20.
5. Ghozali I. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. 8th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro; 2016.
6. Wahyu I, Defitri SY, Das NA. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. 2022;2(3):222–38.
7. Putri EH, Maison W, Dwi Putri R. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Seluruh Nagari di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok). *Cemerlang*. 2022;2(3):164–84.
8. Putri ACP, Akbar FS. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan

- Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah OPD Kota Surabaya.
- JIMEA|JurnalIlmiahMEA(Manajemen,Ekonomi,danAkuntansi). 2022;6(2):14–25.
9. Wardani DK, Primastiwi A, Usun FG. Pengaruh Akuntabilitas Pengurus Organisasi Dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program Kerja. *Jurnal Disrupsi Bisnis*. 2021 Nov 30;4(6):505.
10. Vidyasari FN, Suryono B. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2021.